LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik *(Good Governance)* yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Lhokseumawe

RUDI HIDAYAT, S.STP.,MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760603 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe 2

1.3. Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe 20

1.4. Landasan Hukum 24

1.5. Sistematika Penulisan 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaa Strategi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe 26

2.2. Indikator Kinerja Utama 27

2.3. Perjanjian Kinerja 28

2.4. Pohon Kinerja 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 33

3.2. Capaian Kinerja Organisasi 35

3.3. Analisis Kinerja Capaian Organisasi 37

3.4. Analisis Efisiensi 51

3.5. Analisi Keuangan 53

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Visi Pemerintah Kota Lhokseumawe

"Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki"

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe mewujudkan visi tersebut melalui misi :

No	Sasaran
1.	Misi 1 : Terwujudnya Infrastruktur Kota Berkualitas Tujuan: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing
1.1	Sasaran: Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (Dua) IKU melalui Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhoksumawe Tahun 2023-2026. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe mewujudkan visi tersebut melalui misi:

No	Sasaran
Misi 5 : Mewujudkan Infrastruktur Kota Berkualitas. Tujuan: *Meningkatkan Infrastruktur Kota Berkualitas.*	
1.1	Sasaran: *Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan.*

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota LhokseumaweTahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	*Index Layanan Infrastruktur Perhubungan*	Persen	0,50	0,48	0,48	Tidak Tercapai
2	*Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*	Persen	100	100,00	100,00	Tinggi

Hasil pengukuran capaian IKU Dishub Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas 2 (dua) IKU yang telah mencapai Nilai Tidak tercapai 0,48%. Hasil tersebut masuk dalam capaian katagori Tidak tercapai yaitu 0,98%.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good govenance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe).

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkanberdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 15 Agustus 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

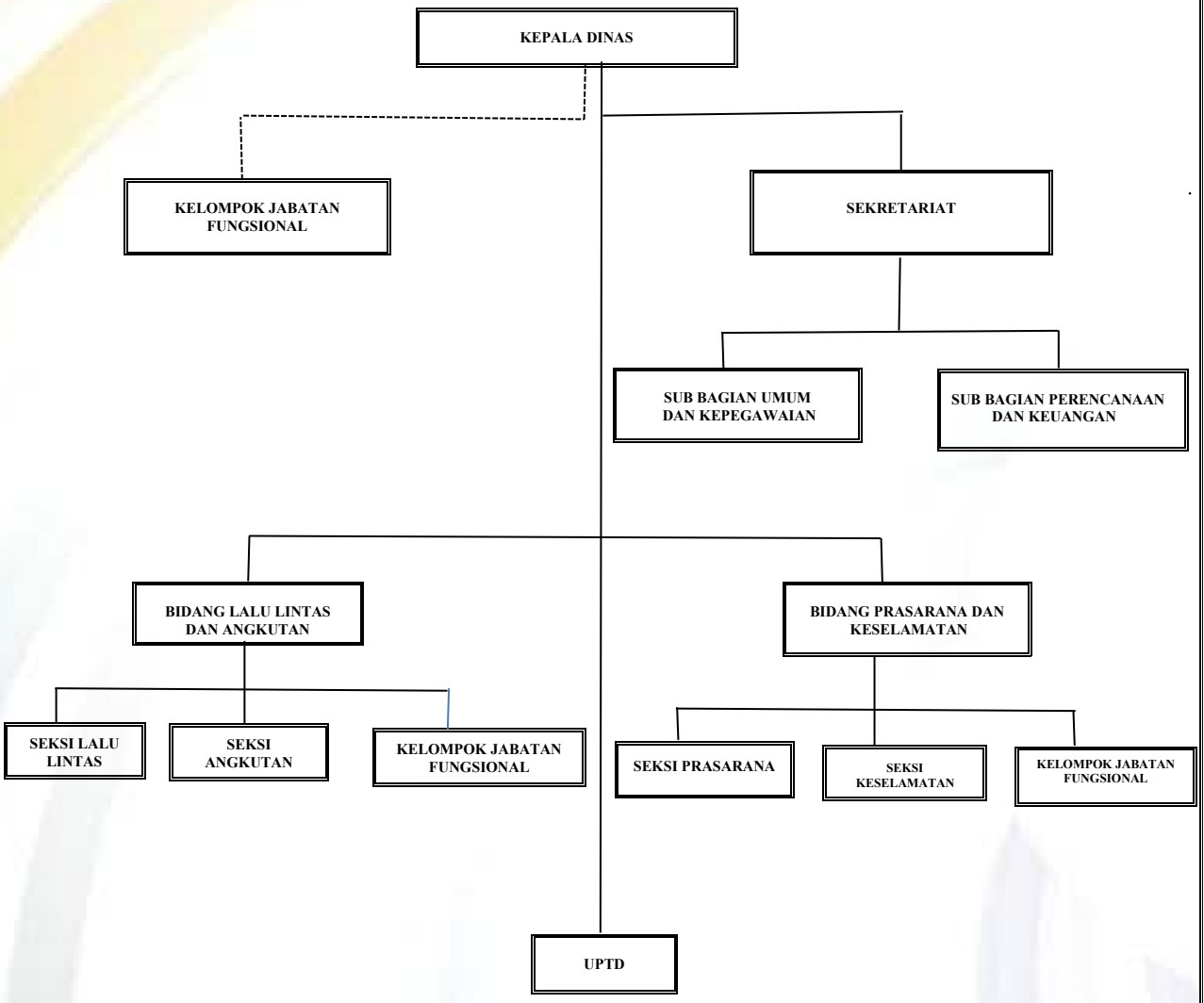
Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe.

Berikut bagan struktur oganisasi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE



Keterangan

1 . ---------- : Gatis Atasan Langsung

2. ---------- : Garis Pembinaan

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe secara rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta bidang Prasarana dan Keselamatan Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rencana program dan rumusan kebijakan teknis dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau hal tersebut di atas, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan rumusan kebijakan teknis dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan.

b. Pelaksanaan pembinaan teknis dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan

c. Pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan dan/atau di perairan.

d. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau di perairan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatandi jalan dan/atau di perairan.

e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau di perairan, serta bidang Prasarana dan Keselamatan di jalan

dan/atau di perairan serta mendokumentasikan dan menyeberluaskan hasil-hasilnya.

f. Penyusunan rencana dan program dalam bidang pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Perhubugan darat dan laut serta keselamatan di jalan dan/atau di perairan.

g. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang Perhubungan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas Perhubungan

Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumah-tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Perhubungan Kota Lhokseumawe. Rincian tugas Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas Perhubungan.
- Menyiapkan bahan pembinaan petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan di bidang kepegawaian dan umum, bidang perencanaan dan keuangan.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan.
- Mengelola kegiatan kepegawaian dan umum, bidang perencanaan dan keuangan.

- Menyusun RKBU lingkup Dinas Perhubungan
- Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubunganmasyarakat serta keuangan.
- Menyususn DUK dan Bedzetting Formasi Pegawai menurut klasifikasi
- Menyiapkan dan mengeluarkan SPT dan SPPD sesuai arahan dan petunjuk atasan
- Mengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Dinas dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas
- Mengkoordinasi penyusunan administrasi keuangan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, SekretarisDinas Perhubungan dibantu oleh 2 (dua) sub bidang meliputi:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhandalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana.
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
- Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lalu lintas, perparkiran, bidang angkutan dan pengujian sarana.
- Pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas dan perparkiran, bidang angkutan dan pengujian sarana perhubungan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
- Penetapan terhadap pemilihan awak kendaraan bermotor, pengendalian operasional kendaraaan umum teladan tingkat Kota Lhokseumawe.
- Penetapan tarif angkutan, jasa pelabuhan sungai, penyeberangan.
- Penetapan lokasi-lokasi perparkiran dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
- Penetapan lokasi-lokasi pemakaian jalan selain bukan untuk kepentingan umumbagi pengguna jalan.
- Pengawasan terhadap kelebihan muatan angkutan barang di jalan Kota, JalanProvinsi dan Jalan Nasional dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala

DinasPerhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dibantu oleh 2 (dua) seksi dan 1 (satu) Fungsional Penguji Kendaraan Terampil yang meliputi:

a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan lalu lintas, melaksanakan andalalin,dan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

b. Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian rencana umum jaringan trayek perkotaan, melaksanakan pemilihan awak kendaraan umum teladan, perizinan angkutan serta penetapan tarif angkutan.

c. Fungsional Penguji Kendaraan Terampil mempunyai tugas membantu kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor, melakukan pengawasan pengukuran kapal berukuran GT.7 kebawah serta melakukan pengujian kapal bermotor.

4. Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan danpengembangan transportasi.
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan

dan pengembangan trasnportasi.

- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hukum daerah bidang prasarana perhubungan dan keselamatan transportasi.
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan tenaga teknis sebagai sumber daya dalam bidang prasarana dan keselamatan transportasi.
- Mengkoordinir pengadaan, pemasangan, pemeliharaan rambu lalu lintas di jalan kota.
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan penyusunan penentuan lokasi, pengadaan, dan pemeliharaan rambu serta jaringan transportasi jalan kota, jalan provinsidan jalan nasional
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan serta bengkel umum di dalam daerah serta pembinaan kendaraan tidak bermotor.
- Mengkoordinasi penyiapan pelabuhan sungai, penyeberangan, penetapan lokasi pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan, terminal penumpang dan barang, stasiun kereta api skala daerah, pemeliharaan, pengawsana sarana prasarana perhubungan.
- Melaksanakan pengawasan terhadap penetapan pemasangan papan reklame, spanduk di jalan dalam rangka penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan menjaga keselamatan pengguna jalan.
- Bersama-sama dengan bidang lalu lintas dan angkutan, melakukan pengawasan terhadap kelebihan muatan bagi angkutan barang di jalan nasional dan jalan provinsi serta jalan kota dan/atau di perairan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Prasarana dan Keselamatan dibantu oleh 3 (tiga) seksi meliputi:

a. Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi pelaporan pada terminal Tipe C, terminal bongkar muat barang, pelabuhan serta melakukan inventarisasi kebutuhan saran dan prasarana lalu lintas.

- Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan bahan perumusan serta evaluasi dan pelaporan terkait audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan

b. kota, jalan provinsi dan/atau jalan nasional dalam wilayah Kota Lhokseumawe, laik fungsi jalan keselamatan sarana prasarana jalan.

c. Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan di bidang pemanduan moda, penyiapan penyediaan angkutan pemaduan moda serta melakukan pemgembangan teknologi perhubungan dan pengembangan transportasi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dapatdikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

Tabel 1.2

Jumlah SDM menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	5
III	14
II	7
I	2
PPPK PENUH WAKTU	65
PPPK PARUH WAKTU	**14**
Total	**107**

Sumber : DUK Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.2

Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Pasca Sarjana	3
Sarjana	29
Diploma III	9
SMA	52
SMP	5
SD	5
Total	**107**

Sumber : DUK Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.2

Menurut Tingkat Eselon

ESELON	JUMLAH
II	1
III	3
IV	6
Fungsional	1
Non Eselon	94
Total	**107**

Sumber : DUK Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.

Untuk menunjang kegiatan administrasi dan lapangan Dinas Perhubungan KotaLhokseumawe didukung oleh fasilitas sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5 Unit
2	Sepeda Motor	10 Unit
3	Mesin Ketik Manual Longawegan 18”	2 Unit
4	Micro Bus (penumpang 15-30 orang)	11 Unit
5	Filling Besi/Metal	12 Unit

6	Papan Pengumuman	14 Unit
7	White Board Elektronic	1 Unit
8	Lemari Kayu	14 Unit
9	Kursi besi/metal	85 Unit
10	Meja rapat	1 Unit
11	Faksimil	1 Unit
12	Meja Biro	53 Unit
13	Sofa	1. Unit
14	AC Split	16 Unit
15	Handy Talky (HT)	24 Set
16	Televisi	2 Unit
17	Mic Wireless	4 Unit
18	Microphone	2 Unit
19	Tustel	3 Unit
20	Alat Rumah Tangga (Proyektor)	1 Unit
21	Handycam	4 Unit
22	CCTV	1 Set
23	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Genset)	2 Unit
24	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tangga)	3 unit
25	Alat Rumah Tangga (Umbul-Umbul)	1 Set

26	Alat Rumah Tangga (Proyektor)	1 Unit
27	Alat Rumah Tangga (Proyektor)	4 Unit
28	Alat Rumah Tangga (pompa air)	1 unit
29	Alat Rumah Tangga (Terali Besi)	2 Set
30	P.C	14 Unit
31	Laptop	6 Unit
32	Printer	16 Unit
33	Meja Kerja Non Struktural	23 Unit
34	Proyektor + Attachment	1Unit
35	Uninterupable Power Supplay (UPS)	6 unit
36	Telepon	2 unit
37	Peralatan Antena SHF/Parabola	1 unit
38	Bangunan Kantor/Terminal	3 Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Tahun 2025.

2.1.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe memiliki peran yang strategis dalam setiap proses/tahapan pembangunan daerah dalam bidang transportasi. Dalam menjalankan kinerja pelayanannya, Dinas Perhubungan melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk rencana pembangunan daerah maupun untuk kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Selama tahun 2024 sampai tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah melakukan perannya secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya dirasakan sesuai dengan yang diharapakan. Persoalan seperti rendahnya partisipasi dalam hal menjaga sarana dan prasarana lalu lintas, masalah pendanaan yang minim menyebabkan kurang optimalnya pembangunan dalam sektor transportasi, sumber daya yang masih kurang dan juga ketidakselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan hal yang urgent untuk diperbaiki pada periode 2025-2029.

2.1.3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe per Desember 2025 sebanyak 107 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

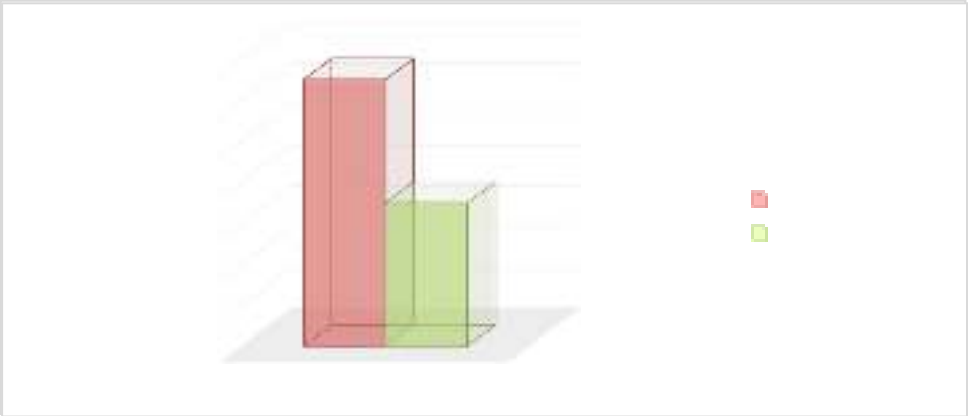
No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kabid	2	-	2
4	Kasie/Kasubbag/Fungsional	5	1	6
5	Pelaksana	47	45	92
Jumlah		**14**	**10**	**24**

Sumber: Dinas Perhubungan

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 60 orang atau 52%, dan jumlah Perempuan sebanyak 47 orang atau sebesar 48%.

Grafik 1.1

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN



Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2

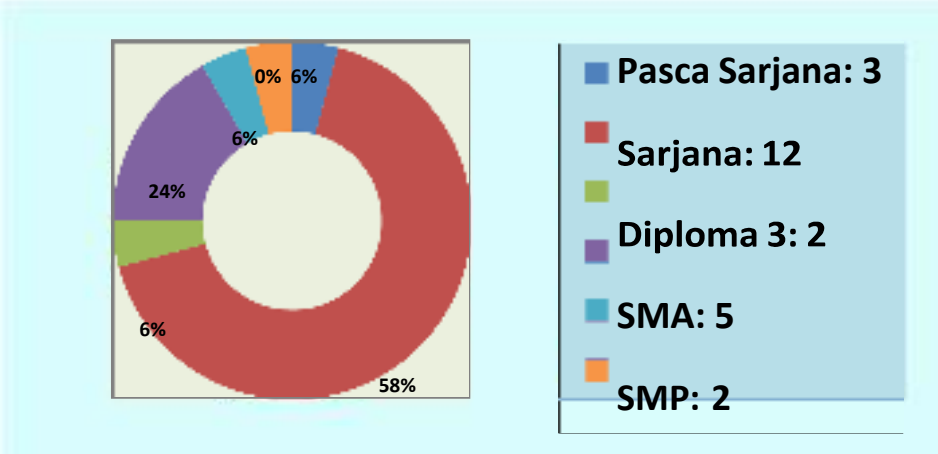
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan

Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Kabid	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Kasie/Kasubbag/ Fungsional	-	-	-	-	-	6	-	-
5	Pelaksana	-	2	5	-	2	5	-	-
Jumlah		**-**	**2**	**5**	**-**	**2**	**12**	**2**	**-**

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat- Pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 6% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 12 orang atau 60%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 2 orang atau 8% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 5 orang atau 12% dan tingkat Pendidikan SLTP sebanyak 2 orang atau 6%.

Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan Sumber : Dinas



Sumber: Dinas Perhubungan

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Sekretariat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

PIM II	1
PIM III	2
PIM IV	2
Total	**5**

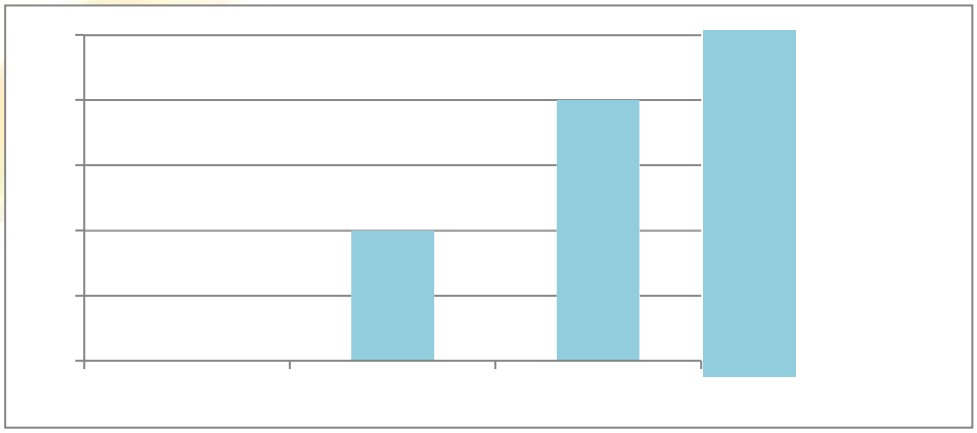
Sumber : Dinas Perhubungan

Komposisi jumlah Pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada grafik 1.3, di mana sebanyak 3 orang yaitu 2 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM III dan 2 orang telah mengikuti

Latihan Jabatan PIM IV.

Grafik 1.3

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Jumlah jabatan struktural dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4

Jumlah Jabatan Struktural/Fungsional di Lingkungan Dinas PerhubunganKota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kabid	-	-	-	2	-	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 8 Jabatan Struktural dan 1 (satu) Fungsional. Dimana Eselon II.b sebanyak 0 (kosong) Orang, eselon III.a sebanyak 1 (satu) Orang, Eselon III.b sebanyak 2 (dua) Orang dan eselon IV.a sebanyak 5 (lima) Orang dan Fungsional Penguji Kendaraan terampil 1 (satu) Orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dishubberdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5

Rincian Pegawai Menurut Pangkat

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Kabid	-	-	1	1
4	Kasie/Kasubbag/Fungsinonal	-	-	6	-
5	Pelaksana	2	5	6	1
Jumlah		**2**	**5**	**13**	**3**

Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 3 orang, pangkat/golongan III sebanyak 13 orang, pangkat/golongan II sebanyak 5 orang, dan pangkat/golongan I sebanyak 2 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe menurut daftarjumlah pegawai di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan,dan Jenis Kelamin

Jabatan	S3	S2	S1	DI,II,III	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	**1**
Kepala Bidang	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	**2**

Kepala Seksi	-	-	6	-	-	-	-	6	5	1	**6**
Pelaksana	-	-	5	2	5	2	-	14	7	8	**14**
PPPK PW	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	**4**
PPPK PRW	-	-	4	1	24	7	3	36	38	3	**41**
	TOTAL							**100**	**TOTAL**		**107**

Sumber : Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe sebanyak 107 orang yang terdiri dari 28 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 65 Orang diantaranya PPPK Penuh Waktu dan 14 orang PPPK Paruh Waktu.

1.3. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;

6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China.

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;

9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.
10. Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe antara lain:

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Membangun komitmen pimpinan dan aparatur di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka penguatan SAKIP;
2. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di lingkunganperangkat daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas antar dokumen;
3. Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map yangtelah disusun dan ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
5. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraanpelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai denganpotensi dan kondisi daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan aparatur.

1.4. LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategi Dishub Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategi Dinas Perhubungan (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029. Pendekatan ini merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang ditempuh oleh Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, yaitu :

Tabel 2.1

Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan DaerahKota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Infrastruktur Kota Berkualitas	1.1	Meningkatnya Index Layanan Infrastruktur Perhubungan	1.1.1 1.1.2	Index Layanan Infrastruktur Perhubungan Persentase Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Miningkatkan Penataan Pengembangan Sistem keselamatan transportasi secara merata

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

1	Meningkatkan Infrastruktur Kota Berkualitas	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan	Index Layanan Infrastruktur Perhubungan	Persen
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Nilai

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Index Layanan Infrastruktur Perhubungan; 2) dan Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi

akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan	Index Layanan Infrastruktur Perhubungan	0,50
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Komposisi Belanja Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 900.000.000
Belanja Daerah	Rp. 6.621.169.782
Belanja Operasi	Rp. 6.366.369.782
Belanja Pegawai	Rp. 2.487.093.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.879.276.782
Belanja Modal	Rp. 254.800.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 254.800.000
Jumlah Belanja	Rp. 6.621.169.782

Sumber: DPPA- Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan tartget kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja operasi dan belanja modal pada ABPK tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.621.169.782.

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjian untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan untuk

belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK Perubahan tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar.

Tabel 2.4

Komposisi Belanja Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025
	Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 900.000.000
Belanja Daerah	Rp. 6.578.909.115
Belanja Operasi	Rp. 6.314.808.115
Belanja Pegawai	Rp. 2.436.974.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.877.835.115
Belanja Hibah	-
Belanja Modal	Rp. 264.100.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 264.100.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
Jumlah Belanja	Rp. 6.578.909.115

Sumber: DPAP- Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

2.4. POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe:

Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe

Tahun 2023-2026

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS

RPK LHOKSEUMAWE 2023-2026



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target} x100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{Target-(Realisasi-Target)}{Target} x100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah menetapkan 3 (tiga) IKU melalui Keputusan Kepala Dinas Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Berikut hasil pengukuran atas IKU Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Ifrastruktur Perhubungan							
1	Index Layanan Infrastruktur Perhubungan	Persen	0,50	0,48	**0,48%**	**Tidak Tercapai**	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	**100%**	**Tercapai**	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa 2 (dua) IKU Dinas

Perhubungan Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja adalah Tidak Mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
1	Index Layanan infrastruktur Perhubungan	Persen	0,50	0,48	**98%**	**Sangat Tinggi**	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	100%	**Sangat Tinggi**	
Capaian IKU Tahun 2025 (%)					100%	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil mencapai yaitu, sebanyak 2 IKU dengan **Kategori: Sangat Tinggi;** Artinya capaian IKU Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 berdasarkan Kategori Kinerja adalah **98% (Sangat Tinggi)**

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

Secara umum, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran index Layanan Infrastruktur Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan					
No	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
1	Indek Layanan Infrastruktur Perhubungan	Persen	0,50	0,48	0,48%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

1. Persentase Indeks Layanan infrastruktur Perhubungan

Peningkatan kualitas Index Layanan Infrastruktur Perhubungan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dalam menciptakan tata kelola Tugas pokok dan fungsi OPD yang baik (*good governance*). Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai program dan kegiatan strategis (seperti: kebijakan perencanaan, pembangunan Terminal Tipe C 2 (dua) Unit, dan pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas bersuar dan Rambu-Rambu Lalu Lintas tidak bersuar) yang dirancang untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan.

IKU Persentase Peningkatan Kualitas Index Layanan Infrastruktur Perhubungan tahun 2024 diukur dengan formula:

$$\left(\left(\frac{Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan\ yang\ Kondisi\ Baik}{Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan\ yang\ seharusnya\ ada} \times 100\%\right) + \left(\frac{Jumlah\ Fasilitas\ Penyelenggaraan\ Terminal\ Tipe\ C}{Jumlah\ Fasilitas\ Penyelenggaraan\ Terminal\ Tipe\ C\ yang\ Tersedia\ Sesuai\ standar} \times 30\%/2\right) + \right)$$

$$= \frac{Jumlah\ Perlengkapan\ jalan\ dalam\ kondisi\ baik}{Jumlah\ Perlengkapan\ yang\ seharusnya\ ada} \text{ x 70 \%}$$

$$= \frac{7}{7} x 70\%$$

$$= 0{,}7$$

$$= \frac{Jumlah\ Fasilitas\ penyelenggaraan\ Terminal\ Tipe\ C}{Jumlah\ Fasilitas\ Penyelenggaraan\ Terminal\ Tipe\ C\ yang\ seharusnya\ ada} \text{ x 30 \%}$$

$$\frac{13}{15} x 30\%$$

$$= 0{,}26$$

$$= 0{,}7 + 0{,}26$$

$$\frac{0.96}{2}$$

$$= 0{,}48$$

Berdasarkan Informasi diatas dapat di jelaskan

- Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan yang dalam kondisi baik adalah sebanyak 7 itu sudah termasuk pengadaan tahun 2025
- Jumlah Perlengkapan jalan yang seharusnya ada 8 namun yang sudah tercatat pada masih dalam kondisi baik sebanyak 8, dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah menyediakan Fasilitas perlengkapan Jalan belum mecapai target yang telah ditetapkan.
- Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe C yang tersedia 13
- Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe C yang tersedia sesuai standar adalah sebanyak 15

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Index Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*
- Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Index Layanan Infrastruktur Perhubungan pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 0,48, Nilai ini telah tinggi dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,50 Artinya, capaian kinerja

tahun 2025 adalah sebesar **0,48%** **(Kategori Kinerja: Tinggi; Predikat Kinerja: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025 sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Index Layanan Infrastruktur Perhubungan pada tahun 2025 adalah sebesar **0,48%**. Sementara, target tahun akhir (2026) Artinya, untuk belum mencapai target akhir, namun sudah termasuk nilai tinggi dan dapat ditingkatkan lagi di tahun selanjutnya.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

- Realisasi kinerja IKU: Persentase Index Layanan Infrastruktur Perhubungan tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan khususnya pada Index Layanan Infrastruktur Perhubungan yang meliputi Perlengkapan jalan yang tersedia, Perlengkapan jalan yang seharusnya ada serta Fasilitas Penyelenggaran Terminal Tipe C, hal ini disebabkan oleh:

1. Keberhasilan Peningkatan Kegiatan

Peningkatan Kualitas Aparatur pada Dinas Perhubungan meningkat pada tahun sebelumnya berdasarkan peningkatan kelancaran kinerja Aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe memiliki peran yang strategis dalam setiap proses/tahapan pembangunan daerah dalam bidang transportasi Dalam menjalankan kinerja pelayanannya, Dinas Perhubungan melakukan

kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk rencana pembangunan daerah maupun untuk kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selama tahun 2023 sampai tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah melakukan perannya secara optimal.

2. Kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun berjalan Beberapa permasalahan yang teridentifikasi oleh Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe antara lain :

   a. belum optimalnya pembangunan sektor transportasi sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan;

   b. belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi;

   c. masih terdapat pembangunan transportasi yang belum taat dalam pemanfaatan ruang;

   d. belum tersedianya aturan perundang-undangan yang mengatur masalah transportasi online yang pada dewasa ini dengan

   e. sektor keselamatan belum menjadi faktor penting pada masyarakat sewaktu berkendara, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan penindakan agar terciptanya disiplin dalam berlalu lintas. Untuk hal tersebut perlu untuk Dinas Perhubungan menitik beratkan pelayanan pada masyarakat melalui pengujian kendaraan bermotor.

   f. Terwujudnya konektivitas nasional meningkatkan kualitas SDM transporasi yang kompeten serta meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan berdasarkan isu-isu strategi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Lhokseumawe untuk tahun 2023-2026 adalah pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, selanjutnya, guna memudahkan perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe 2023-2026.

3. Keberhasilan Peningkatan Kegiatan

Peningkatan Kualitas Aparatur pada Dinas Perhubungan meningkat pada tahun sebelumnya berdasarkan peningkatan kelancaran kinerja Aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe memiliki peran yang strategis dalam setiap proses/tahapan pembangunan daerah dalam bidang transportasi Dalam menjalankan kinerja pelayanannya, Dinas Perhubungan melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk rencana pembangunan daerah maupun untuk kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Selama tahun 2023 sampai tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah melakukan perannya secara optimal.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Sub Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota); (Sub Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; (Sub Kegiatan: Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembanunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota); (Sub Kegiatan: Pengujian Kendaraan Bermotor (Sub Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; (Sub Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.429.773.655,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.356.835.980,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **94,90**%.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya Index Layanan Infrastruktur Perhubungan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 0,37% Pada Tahun 2024 sedangkan tahun 2025 dengan capaian target hanya 0,48% realisasi

dengan katagori telah belum mencapai target yang telah ditentukan sesuai Prgram dan kegiatan serta sesuai dengan anggaran yang tersedia

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 terhadap target sesuai IKU yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 telah realisasi mencapai 0,48%. Untuk itu pada Tahun 2025 target sebesar 0.48 merupakan belum mecapai target yang telah ditentukan yaitu 0,50

Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut di atas, yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025. Dalam merealiasikan target kinerja Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe telah berupaya semaksimal mungkin. Akan tetapi masih terdapat kekurangan/kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja yang dimaksud. Faktor-faktor penyebab terhambatnya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memadai
2. Tidak tersedia Anggaran yang sesuai diharapkan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Program Pendukung Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	1.429.773.655.00	1.356.835.980.000.00	94,90
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	47.500.000.00	40.156.000.00	84,54
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	990.423.655.00	977.771.980.00	98,72
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.000.000.00	23.121.000.00	33,23
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	237.270.000.00	232.495.000.00	97,99
	JUMLAH	1.429.773.655.00	1.356.835.980.00	94,90

Sumber: DPPA-Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025

SASARAN STARTEGIS 2
MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah sebagaiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.11
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 3 Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD\ yang\ Mencapai\ Target}{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe mempunyai 2 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota

Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angutan Jalan; Berikut pengukuran untuk tahun 2024 atas kedua indikator program tersebut:

1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diukur melalui:

Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$= \frac{Jumlah\ Dokumen\ Adm.Pemerintah\ yang\ dilaksanakan}{Jumlah\ dokumen\ yang\ harus\ tersedia} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{7} \times 100\% = \mathbf{100}\%$$

2) Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui:

Persentase Meningkatnya Index Layanan Infrastruktur Perhubungan:

$$= \frac{Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan\ yang\ tersedia\ Untuk\ Peningkatan\ Index\ Layanan\ Infrastruktur\ Peruhubungan}{Jumlah\ Perlengkapan\ jalan\ yang\ Terdata} \times 100\%$$

$$= \frac{Jumlah\ Perlengkapan\ jalan\ dalam\ kondisi\ baik}{Jumlah\ Perlengkapan\ yang\ seharusnya\ ada} \text{ x 70 \%}$$

$$= \frac{7}{7} x70\%$$

$$= 0{,}7$$

$$= \frac{Jumlah\ Fasilitas\ penyelenggaraan\ Terminal\ Tipe\ C}{Jumlah\ Fasilitas\ Penyelenggaraan\ Terminal\ Tipe\ C\ yang\ seharusnya\ ada} \text{ x 30 \%}$$

$$\frac{13}{15} x30\%$$

$$= 0{,}26$$

$$= 0{,}7 + 0{,}26$$

$$\frac{0.96}{2}$$

$$= 0{,}48$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD\ yang\ Mencapai\ Target}{Jumlah\ Indikator\ Program\ OPD} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = \mathbf{100}\%$$

Selanjutnya, analisis Capaian Kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 96,90%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **96,90% (Kategori Kinerja: Sedang; Predikat: Tinggi)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025 sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar **96,90%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **100%**. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak **3.10**% lagi. Dengan kata lain, pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Perhubungan wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari 2 Program indikator program tersebut ada (Dua) indikator program yang belum mencapai target, yaitu 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari Target 0,50 sedangkan yang dicapai adalah 0,48%,

Penyebab tidak tercapainya indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe. Juga tersedianya SDM yang memadai terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi Dinas Perhubungan kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah:

1. Melakukan pengajuan anggaran tambahan pada tahun 2026.
2. Pengembangan Potensi SDM di Dinas Perhubungan agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang di harapkan.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan total anggaran sebesar Rp. 6.782.641.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.837.177. 674,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **86,06%**.

3.4. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{Capaian\ Kinerja\ yang\ Dihasilkan\ (Output)}{Capain\ Anggaran\ yang\ Digunakan\ (Input)} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efesiensi
1	Index Layanan Infrastruktur Perhubungan	Persen	0,48	86,06%	100 %
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100%	100%

Sumber Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.12 diatas, Analisis Efisiensi terhadap Sasaran Strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Index Layanan Infrastruktur Perhubungan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,48% (Sangat Efisien).
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 96,60% (Sangat Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar

dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan,

Pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**5.399.568.280.00**	**4.480.342.694.00**	**83,70**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	50.000.000.00	40.068.831.00	94.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.762.164.480.00	2.899.679.365.00	83.38
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.654.450	115.306.850	99,70
Administrasi umum Perangkat Daerah	103.338.895.00	98.341.271.00	95,16
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	993.615.280.00	858.782.102.00	86,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.761.550.00	466.163.275.00	75.58

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**1.429.773.655.00**	**1.356.835.980.000.00**	**94.90**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dijalan Kabupaten/Kota	47.500.000	40.156.000.00	84,54
Pengelolaan Terminal Tipe C	990.423.655.00	977.771.980.00	98,72,
Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000.00	23.121.980.00	33,23
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dijalan	237.270.000.00	232.495.000.000	97,99
TOTAL	**6.885.841.430.00**	**5.940.030.074.00**	**86,26**

Berdasarkan Tabel 3.6, selama tahun 2025 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Perubahan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **6.885.841.430** sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. **5.940.030.074** atau serapan anggaran sebesar 86,26 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp. 945.811.356,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata kinerja Dishub Lhokseumawe sebesar 86,26%. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Februari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA LHOKSEUMAWE

RUDI HIDAYAT, S.STP.,MA
PEMBINAUTAMA MUDA
NIP. 19760603 199511 1 001